

E-ISSN: 2829-4580, P-ISSN: 2829-4599

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v1i3>

Received: 27 Oktober 2022, Revised: 7 November 2022, Publish: 18 Desember 2022



Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Aceh Jaya (Studi Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Ismail¹, Mashuri²

¹)Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia, email: ismail@unida-aceh.ac.id

²)Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia,

Corresponding author: Ismail¹

Abstract: As in the role of Supervision carried out by the Implementation of Supervision of the Regional Inspectorate on the implementation of Government in Aceh Jaya District, in the process of implementing a policy in implementation as Government Regulation Number 20 of 2001 concerning the guidance and supervision over the implementation of Regional Government where the supervision must be in accordance with What is expected by all components of Aceh Jaya District Government and the community in an inspectorate supervision in Aceh Jaya Regency, where in the implementation of the role of the Government of Aceh Jaya District is required in the implementation in the field, as in the process, in need of a regulation that is in the Government in The supervisory function of the Inspectorate on the implementation of the government in Aceh Jaya District, as for the formulation of the problem in this study are (1) How the Inspectorate Supervision Function over the Implementation of Local Government in Aceh Jaya District (2) What actors are supporting and inhibiting the function of Supervision of Inspectorate on Government Implementation in Aceh Jaya Regency, with the objectives of research (1) To Analyze the Inspectorate Supervision Function on the Implementation of Aceh Jaya Regency Government, (2) To Know Supporting Factors and Inhibitors of Inspectorate Inspection Function On the Implementation of Local Government in Aceh Jaya Regency, using qualitative descriptive method in analyzing data, data obtained through interviews and data collection from research informants, and conclusion. As in the process of Observation and Documentation as well as interviews, in the Inspectorate function it is important to improve supervision in Aceh Jaya Regency Government as both Budget Supervision and Financial Auditor in Aceh Jaya District Government, where the role of Inspectorate Supervision in Monitoring Policy is very important. By then it can be concluded that the ability of Inpektorat in Better Supervision will get a better effect as well, though that does not mean there are no obstacles in implementing supervision Inspectorate in Aceh Jaya District.

Keywords: *Supervision of Inspectorate.*

Abstrak: Sebagaimana dalam peran Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Jaya, maka dalam proses melakukan suatu kebijakan dalam implementasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana dalam pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang di harapkan oleh semua komponen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan masyarakat dalam suatu pengawasan Inspektorat di Kabupaten Aceh Jaya, dimana dalam pelaksanaan perlu peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pelaksanaan di lapangan, sebagaimana dalam prosesnya, maka di perlukan suatu peraturan yang ada pada Pemerintah dalam fungsi pengawasan Inspektorat atas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Fungsi pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Jaya (2) Faktor-Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat fungsi Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya, dengan tujuan penelitian (1) Untuk Menganalisis Fungsi Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, (2) Untuk Mengetahui Faktor-faktor pendukung dan Penghambat Fungsi Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Jaya, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data, data yang di peroleh melalui wawancara dan pengambilan data dari informan penelitian, dan pengambilan kesimpulan. sebagaimana dalam proses Observasi dan Dokumentasi maupun wawancara maka dalam fungsi Inspektorat sangatlah penting untuk meningkatkan pengawasan di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya baik sebagai Pengawasan Anggaran maupun Auditor Keuangan dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dimana peran Pengawasan Inspektorat dalam Kebijakan pengawasan sangatlah penting. Dengan kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan Inpektorat dalam Pengawasan yang lebih baik maka akan memperoleh pengaruh yang lebih baik pula, walaupun demikian bukan berarti tidak ada hambatan dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat di Kabupaten Aceh Jaya.

Kata Kunci: Pengawasan Inspektorat.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan itu maka seyogyanya kabupaten aceh jaya sebagai salah satu kabupaten yang berotonomi di provinsi aceh yang dibentuk dari hasil pemekaran daerah kabupaten aceh barat tahun 2002 didasarkan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten aceh barat daya, kabupaten gayo lues, kabupaten aceh jaya, kabupaten nagan raya dan kabupaten aceh tamiang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan adanya penjabaran tersebut maka jelas bagi kita bahwa dengan adanya pemekaran daerah maka otonomi sekaligus akan muncul sehingga negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional diatur dengan undang-undang dan pemerintahan daerah itu sendiri menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Disini tergambar jelas bahwa pemerintahan daerah merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, maka dalam rangka mengupayakan terwujudnya keserasian penyelenggaraannya diperlukan pengawasan dalam rangka menjaga tetap utuhnya wilayah dan

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berkedaulatan rakyat dibawah payung idiil Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Daerah secara utuh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum, dengan menjelmakan dalam upaya memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal demikian pula dengan sebaliknya, daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian fungsi pengawasan inspektorat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten aceh jaya lebih mudah dilakukan karena memiliki sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menggerakkan pemerintahan daerah yang baik dibawah kendali pemerintah pusat melalui otonomi daerah.

Beberapa hasil penelitian tentang peranan dan sejenis tentang Peran Auditor Internal yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah Eko Prihartono, (2009), Universitas Depenogoro Semarang, judul tesis Pelaksanaan pengawasan fungsional dalam rangka menuju optimalisasi kerja, Lokasi penelitian Departemen Pertanian, hasil penelitian yang digambarkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara fungsional karena beban pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai sering berubah-ubah baik kerna tugas tambahan maupun mutasi kerja. Dia juga menjelaskan bahwa secara fungsional pengawasan yang dilakukan oleh para ouditor masih berada satu atap dengan instansi yang dilakukan pengawasan dalam pengertian masih berada posisi sederajat antara pengawasan dengan yang di awasi. Dia menambahkan bahwa optimalisasi kerja masih bersifat abstark dalam arti pengukuran kinerja yang akan dibahas masih membedakan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya.

Di sisi lain, Ika Berty Apriliyani, (2010), Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Riau, lokasi penelitian pada Inspektorat Provinsi Riau, judul tesis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Aparatur pemeriksaan instansi pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Riau dengan hasil bahwa kemampuan aparatur pemeriksaan instansi pemerintah sangat ditentukan oleh kemauan aparatur itu sendiri yang memfungsikan dirinya sebagai auditor pemeriksa dan menentukan kebijakan pemeriksaan. Selain itu, menurutnya, aparat pemeriksaan pada inspektorat provinsi riau perlu diberikan pelatihan, pembekalan dalam membekali dirinya selaku auditor pemerintah yang bertanggungjawab kepada gubernur cq sekretaris daerah dan pemeriksaan yang dilakukan para auditor bukanlah mencari kesalahan dan kesilapan instansi SKPD di daerah akan tetapi meluruskan proporsinya sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pembinaan maupun pengawasan yang dilakukan dapat mengarah pada perbaikan kinerja berdasarkan program kerja instansi.

Penelitian lainnya seperti Sentot Rahmat, (2010), Fakultas ekonomi Program studi magister akuntansi, lokasi penelitian pada Kementerian Keuangan Jakarta, judul Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparatur Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (studi pada kementerian keuangan) dengan, hasil penelitian bahwa sebagai aparat pengawasan intern peran irspektorat jenderal sebagai soko guru dalam pengawasan instansi dibawahnya dalam arti memberikan arahan dan petunjuk terhadap program kerja yang dilakukan, serta embina dan mengawasi keberadaan kegiatan rutin dan fisik pada instansi yang dilakukan pengawasan agar seluruh aktifitas pemeriksaan lebih akurat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini tentang bagaimana pengawasan inspektorat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Jaya dan faktor-faktornya.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Sejarah perkembangan organisasi sosial, politik dan ekonomi modern telah membuktikan kepentingan peranan pemeriksanaan (audit) dalam mewujudkan keberhasilan organisasi. Fenomena ini dijelaskan dengan teori *asymmetrical information* (kesejangan informasi) sebagaimana Waker dalam ulum (2009: 127) menyebutkan bahwa kelanggengan organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang seimbang, terbuka dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan, sedangkan disisi lain beranggapan bahwa yang banyak terjadi adalah kesenjangan informasi diantara pihak-pihak terkait terutama antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung dengan subjek yang diinformasikan dan pihak konstituen yang berada di luar lingkungan manajemen (stakeholders). Suatu hal yang bersifat klusial dalam dalam teori Implementasi kebijakan ditinjau dari studi kebijakan publik, maka Edwar III dalam Santosa (2008: 41) menyebutkan bahwa “Implementasi kebijakan adalah *“Is the stage of policymaking between the establishment of a policy”* (tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan)”. Dalam perkembangan selanjutnya implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn dalam Sadhana (2011: 175) mendefinisikan sebagai berikut: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Perkembangan poila fikir pemerinmtah suatu negara dalam mengembangkan sistem politik selalu berorientasi pada kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah, karena badan tersebut sebagai lembaga resmi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah secara rutin, dari hari kehari yang membawa dampak pada warganegaranya. Perjalanan ini sebagaimana ditegaskan Anderson dan Henry dalam Subarsono (2010: 88) menyebutkan “Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lapsky disebut *“street level bureaucrats”* atau untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran.

Organisasi

Disiplin administrasi negara diramalkan akan terpusat pada penelaahan tentang organisasi, karena teori organisasi sendiri adalah teori yang membicarakan perilaku manusia mulai dari manusia dalam kelompok suku ke manusia dalam pemerintahan. Organisasi dirumuskan sebenarnya sangat tergantung pada konteks dan perspektif tertentu dari seseorang yang merumuskan tersebut, sebagaimana Thompson dalam Thoha (2010: 165) menyebutkan bahwa *An organization is a ‘highly’ rationalized and impersonal integration of a large number of specialists cooperating to achieve some announced specisic objektive* (Sebuah organisasi adalah “sangat” dirasionalisasikan dan impersonal integrasi dari sejumlah besar spesialis bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan tertentu diumumkan). Dalam perkembangan lain Barnard dalam Thoha (2010: 165) secara mandiri memiliki rumusan tertentu tentang organisasi sesuai denngan perspektifnya, sehingga ia merumuskan organisasi sebagai berikut *“An organization is a system of consciously coordinated personal activities or forces of two or more persons* (Suatu organisasi adalah suatu sistem secara sadar terkoordinasi kegiatan pribadi atau kekuatan dari dua atau lebih orang)”. Disini Thompson merumuskan organisasi dengan penekanan pada tingkat rasionalitas dalam usaha kerjasama tersebut, sedangkan Barnard menentukan sistem kerjasama yang terkoordinasikan secara sadar, sehingga kesamaan terletak pada masing-masing perspektif yang merumuskan. Pendapat Muluk (2008: 185) menyebutkan bahwa “Organisasi yang kuat merupakan alat kendali perilaku manusia yang efektif sekaligus efisien”. Secara tegas teori organisasi merupakan alat manusia untuk mengorganisasikan diri

dengan manusia lain sehingga suatu pekerjaan yang akan dilakukan lebih mudah untuk diselesaikan, oleh karena itu keberadaan

Pengawasan

Dalam teori pengawasan dikenal kelanggengan organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang seimbang, terbuka, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Sebagaimana pendapat Scott dalam Ulum (2009: 127) menyebutkan bahwa yang banyak terjadi adalah kesenjangan informasi diantara pihak-pihak yang terkait, terutama antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung dengan subjek yang diinformasikan dan pihak konstituen yang berada di luar lingkungan manajemen (stakeholders).

Terdapat 2 (dua) sisi negatif dari gejala *asymmetrical information* (kesenjangan informasi) yaitu:

1. Pihak yang mempunyai superioritas dalam menguasai informasi akan bertindak untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya, dengan kerugian di pihak lain;
2. Pihak lain merasa di sisi interior dalam mengenal apa yang sebetulnya terjadi akan cenderung apatis dan tidak percaya pada apa yang diinformasikan kepadanya.

Secara umum fungsi pengawasan diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dan mata masyarakat untuk menilai dengan kompetensi khusus tindakan dan laporan yang disampaikan oleh instansi pemerintahan daerah, sehingga pengawasan disini sebagai fungsi yang sangat instrumental dalam perwujudan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab. sebagaimana pandangan Baswir dalam Ulum (2008: 129) menyebutkan bahwa “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”.

Demikian pula terhadap pengawasan keuangan negara sebagaimana pendapat Baswir dalam Ulum (2008: 129) menyebutkan bahwa “Pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah digariskan”. Pada halaman 3 pasal 1 angka (8) Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan pemahaman pengawasan secara umum dalam halaman 3 pasal 1 angka (9), (10), (11) dan (12) Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pada Pasal 1 angka (9), Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; pada Pasal 1 angka (10), Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian; pada Pasal 1 angka (11), Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya; dan pada Pasal 1 angka (12), Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

METODE PENULISAN

Dalam Pendekatan penelitian ini pada dasarnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa penelitian yang peneliti lakukan untuk memperoleh suatu gambaran terhadap fungsi pengawasan inspektorat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Jaya (implementasi Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah). Dalam

pemahaman pendekatan penelitian ini yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, menurut pendapat Moleong (2014: 6) menguraikan pandangannya sebagai berikut “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Dalam pandangan penelitian kualitatif ini sebagaimana uraian Moleong (2014: 103) bahwa pendekatan penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya.

Selanjutnya pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, sebagaimana diuraikan kembali Moleong (2014: 6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan sifat satu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu sehingga pendapat Soetanyo (2010: 65) menyebutkan bahwa “Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (in depth) dan total/menyeluruh (holistic), dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel”. Namun Moleong (2014: 63) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif mencirikan makna “kuantitas” yang menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah”. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Dalam banyak pandangan penelitian kualitatif dimaksud pemahaman pendekatan penelitian kualitatif, menurut pendapat Moleong (2014: 6) menguraikan metode penelitian kualitatif merupakan “metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi”. Sebenarnya metode penelitian ini mengarah pada penggunaan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Perkembangan penelitian dalam dunia modern banyak pandangan-pandangan yang disampaikan para peneliti sebagaimana Sevilla dkk, (2007: 71) Penelitian Deskriptif (Descriptive) bertujuan “Membuat pencenderaan/lukisan/deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti, serta meluas dari beberapa variabel tertentu saja (tidak mendalam seperti studi kasus)”. Adapun alasan penelitian kualitatif supaya peneliti mampu mengembangkan diri pada objek yang diteliti sesuai dengan gejala-gejala yang muncul dilapangan sehingga adanya solusi dan pemecahan masalah dari fungsi pengawasan inspektorat atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Jaya.

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan-batasan yang akan digali peneliti sesuai dengan latar belakang masalah sehingga dalam menentukan langkah peneliti terhadap objek penelitian agar dapat melakukan pemusatan sasaran dilapangan. Dalam perlembangan berikut maka Bungin (2006: 41) menyebutkan bahwa “Fokus penelitian mengandung penjelasan

mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas”.

Secara transparansi fokus sebagai upaya untuk menentukan kepastian yang dilakukan terhadap ruang lingkup penelitian untuk menentukan keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dapat memfokuskan diri sebagai penelitian kualitatif yang berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan sebagai acuan dalam ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini ruang lingkup penelitian atau fokus penelitian dapat berubah sesuai dengan perkembangan dari masalah penelitian. Senada dengan hal tersebut menurut sifat dari pendekatan kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pikir empirikal induktif, yang diartikan sebagai segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dalam kaitan ini sebagaimana pendapat Moleong (2014: 94) menyebutkan fokus sebagai berikut:

Penetapan fokus penelitian atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di area atau lapangan penelitian. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalah sudah cukup baik dan telah dirumuskan atas dasar penelaahan kepustakaan dan dengan ditunjang oleh sejumlah pengalaman tertentu, bisa terjadi situasi di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah itu.

Fokus penelitian diperlukan dalam setiap penelitian agar adanya pemusatan terhadap suatu objek penelitian dengan tujuan membatasi diri pada bidang studi yang dipelajari (inquiry), yang dalam pengertian inquiry ini menurut pandangan Piaget dalam Mulyasa (2008: 108) menyebutkan Inquiry adalah model yang mempersiapkan pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan pihak lain. Selain itu, peneliti menentukan langkah selanjutnya agar dapat menentukan perolehan hasil dilapangan baik yang bersifat dihilangkan maupun dimasukkan sebagai hasil penelitian, sehingga kelengkapan data dimaksud sebagaimana Strauss dan Corbin dalam Moelong (2014: 60) menyebutkan menentukan kriteria-kriteria untuk memasukkan/mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan dalam artian melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana (meski mungkin menarik tetapi karena tidak relevan) yang tidak perlu dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan.

Secara jelas juntut mengetahui tepat atau tidaknya sasaran fokus dalam penelitian sangat tergantung pada pemusatan pemikiran peneliti untuk memperoleh data yang tepat, cepat dan sesuai dengan data maupun informasi yang ada dan diperoleh dilapangan dan membandingkan sesuai kebutuhan penelitian. Demikian pula dalam ruang lingkup atau fokus penelitian terhadap fungsi pengawasan inspektorat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Jaya (Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah) yang diselaraskan dengan pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Jaya (Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah) serta faktor-faktor pendukung dan penghambat Fungsi pengawasan inspektorat.

Secara pemahaman umum lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti agar mendapatkan data dan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti, sehingga perolehan data maupun informasi itu lebih bersifat akurat atau mendekati kebenaran. Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Jalan Negara Banda Aceh Meulaboh yang berada dalam satu kompleks perkantoran pemerintah secara padu.

Sebelum melakukan penelitian, penulis harus tahu apa yang harus diteliti dan data-data apa saja yang harus diambil dan dikumpulkan untuk melengkapi laporan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang diinginkan sebagaimana pandangan Bungin (2006: 129) menyebutkan teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan penggunaan teknik pengumpulan data jika tidak digunakan semestinya, akan berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber dan jenis data dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Data merupakan faktor penting dalam penelitian untuk itu diperlukan teknik tertentu dalam pengumpulan data.

Sebenarnya teknik pengumpulan data itu dilakukan peneliti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dikumpulkan dengan berbagai teknik agar memudahkan untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data, yang biasanya dilakukan melalui tahap demi tahap dalam penelitian kualitatif melalui proses pengumpulan data yang diklasifikasi dari 3 (tiga) aktifitas kegiatan yaitu wawancara mendalam (Indepth Interview), analisa dokumentasi, dan observasi langsung (partisipasi pasif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Inspektorat Daerah

1. Pengawasan Anggaran

Dalam menjalankan Fungsi Inspektoral di pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, Maka di perlukan pengawasan Anggaran yang baik sebagaimana dalam peraturan Pemerintahan dalam Inspektoral Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Aceh Jaya, sehingga tercitanya Kabupaten yang bersih dari KKN dalam hal ini sangatlah penting fungsi pengawasan di Kabupaten Aceh Jaya, Sehingga apapun program pemeritahan dapat berjalan sebagaimana meskinnya, dan tidak mengalami hambatan di lapangan dan Pemerintahan, guna mewujudkan Keinginan tersebut maka di perlukan Organisasi pengawasan yang baik dan bermutu, dalam melaksanakan pengawasan di Kabupaten Aceh Jaya dan di situlah di perlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan Sistematis dalam dalam melakukan pengawasan di Kabupaten Aceh Jaya, Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 1 (satu) sebagai berikut:

Temuan 1 : Dalam menjalankan pengawasan Inspektorat Aceh Jaya melakukan dengan cara fungsi dan tugas pokoknya dalam melakukan pengawasan anggaran.

2. Pendampingan

Dalam prosesnya untuk melakukan suatu proses dalam pendampingan di perlukan keterlibatan semua pihak proses dalam pelaksanaan anggaran oleh pemerintah tentunya di perlukan pendampingan dalam pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana dalam pelaksanaan anggaran tentunya sangat di perlukan oleh sebab itu dalam prosesnya pendampingan di perlukan dalam melakukan pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga menjadi pendampingan dalam pengawasan yang baik di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, dimana fungsi- fungsi manajemen senantiasa berjalan secara professional dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi dalam tujuan yang di inginkan mencapai sasaran dan tujuan,

Dengan Adanya pedoman, dalam menatap struktur organisasi maka akan membuat peningkatan Keefektifan Organisasi itu sendiri dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 2 (dua) sebagai berikut:

Temuan 2 : Dalam prosesnya pendampingan sangatlah di perlukan dalam proses peningkatan Pengawasan yang baik dan di perlukan di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan Temuan 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan Proposisi minor 1 (satu) sebagai berikut:

Proposisi Minor 1 : Pengawasan Inspektorat berdasarkan Struktur Organisasi berdasar Qanun tentunya di perlukan Pendampingan yang baik sebagaimana tujuan bersama.

3. Audit keuangan

Dimana diketahui Audit keuangan adalah merupakan bagian Prosesnya Audit keuangan yang dijalankan sangatlah penting dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya, dimana dalam pelaksanaannya di perlukan keterlibatan semua pihak, dimana dalam prosesnya Audit dalam proses penyampaian tujuan yang di inginkan dalam Pelaksanaannya, maka dalam prosesnya Audit Keuangan sangatlah penting, dimana dalam prosesnya, audit keuangan sangatlah penting di laksanakan dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, Sebagaimana dalam Pelaksanaan di perlukan keterlibatan dalam proses untuk mencapai apa yang di Inginkan Oleh Masyarakat, sebagaimanan Menurut Hatta Ali (2014 :228) dimana menyatakan bahwa evaluasi atas laporan keuangan khususnya dalam penggunaan Anggaran harus dilaksanakan secara Independensi. Berdasarkan pembahasan di atas maka di temukan Temuan 3 sebagai berikut:

Temuan 3 : Peran serta Audit keuangan di Kabupaten Aceh Jaya, sangatlah di perlukan dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Inspektorat Atas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya sehingga pemerintahan dalam berjalan dengan Transparan di Kabupaten Aceh Jaya.

Faktor-Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Pengawasan

Dalam pengawasan di Inspektorat di butuhkan sumber daya pengawasan yang profesionalisme dan prima, dalam kemampuannya untuk melakukan pengawasan sesuai dengan wewenang maupun fungsi dan tugas pokoknya dan perannya sehingga menghasilkan suatu lembaga pengawasan yang bermutu di lingkungan pemerintahan Aceh Jaya, sehingga Sumber daya pengawasan tidak dapat berjalan sendiri tanpa keikutsertakan bantuan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi antara lain seperti Tokoh masyarakat, Akademisi, dunia usaha dan bantuan lembaga swalaya masyarakat maupun media massa yang memberitakan pengawasan yang dilakukan Inspektorat kabupaten Aceh Jaya. pengendalian harus di lakukan Inspektorat untuk meninhkatkan Sumber Daya pengawasan yang baik, dalam tiap pengawasan di perlukan Sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dalam melakukan pengawasan dan perbinaan yang baik dan sesuai dengan Undang-undang pemerintahan Republik Indonesia dalam fungsi Inspektorat dalam pengawasan, sebagaimana menurut M. Manullang dalam Ali (2014 :76) mengatakan pengawasan merupakan suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan untuk di nilai.

Tugas pengawasan di pemerintahan Aceh Jaya, dengan adanya sumber daya pengawasan yang baik di Inspektorat kabupaten Aceh Jaya, maka akan dapat penghargaan baik dari masyarakat maupun Inspektorat provinsi dan pusat, sehingga dalam sumber daya pengawasan harus di dorong oleh ketelibatan semua elemen untuk kepentingan bersama, untuk meningkatkan setiap fungsi dari pengawasan di Inspektorat di kabuapten Aceh Jaya, sehingga perananan dapat berjalan dengan baik dalam pengawasan sebagaimana dalam peraturan pemerintahan nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. dengan demikian maka dalam pelaksanaan tugas di Inspektorat

Kabupaten Aceh Jaya Sedangkan menurut prayudi dalam ali (2014:76) pengawasan merupakan suatu proses tindakan yang telah di tetapkan dalam suatu evaluasi. Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 4 sebagai berikut:

Temuan 4 : Sumber daya pengawasan sangat diperlukan untuk mengendalikan pengawasan intern.

Berdasarkan pembahasan pada temuan 3 dan 4 Maka ditemukan Proposisi Minor 2 sebagai berikut:

Proposisi Minor 2 : Dalam pelaksanaan Pengawasan tentunya di perlukan Keterlibatan semua Pihak.

2. Sumber Daya Pendidikan

Dalam hal ini di perlukan sumber daya pendidikan dan pelatihan di Inspektorat pemerintahan Aceh Jaya, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak mengalami hambatan dari sumber daya pengawasan inspektorat itu sendiri, sehingga dalam melaksanakan Pengawasan yang dilakukan inspektorat di pemerintahan di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilakukan dengan baik sebagaimana dalam peraturan pemerintahan dalam Inspektorat dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan melakukan wewenang dengan baik. Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 5 sebagai berikut:

Temuan 5 : Sumber Daya Pendidikan untuk memberdayakan peran pembinaan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pembahasan temuan 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan Proposisi Minor 3 (tiga) sebagai berikut:

Proposisi Minor 3 : Sumber daya pengawasan dan pendidikan sebagai sarana mengarah pada kecerdasan bangsa.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu yang sangat di butuhkan dalam suatu skruktur organisasi di pemerintahan di kabuapaten Aceh Jaya, sebagaimana dalam kepemimpinan (Leardership). sedangkan menurut Smith dalam Agus Joko Purwanto (2009: 335) Pengertian pemimpin adalah Seseorang yang memberikan Insperasi Kepada Orang lain Untuk mencapai Tujuan dalam mana Orang-orang tersebut tidak dapat melakukannya sendiri, semua organisasi mempunyai pemimpin, dimana seperti kita ketahuin pemimpin banyak di temukan dalam kelompok-kelompok formal dan Informal. kepemimpinan yang Efektif untuk memperoleh individu yang berkualitas, kelompok, dan organisasi adalah suatu yang sangat penting, dalam Inspektorat sendiri jika tidak memiliki pemimpin yang bisa melaksanakan arahan kepada bawahan dalam pelaksanan tugas dan fungsi pokok inspektorat dalam melakukan tugas dalam pengawasan di kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 6 sebagai berikut:

Temuan 6 : Kepemimpinan merupakan pola kerja untuk menggerakkan aparatur kearah profesional.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana menurut Hatta Ali (2014 :109) Menyatakan Fungsi pengawasan harus sesuai dengan surat keputusan presiden dalam pengawasan dan pembinaan, sebagai Fungsi pengawasan Inspektorat atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Aceh Jaya dalam Implementasi peraturan pemerintahan Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten Aceh Jaya, baik dalam susunan organisasi maupun lembaga struktur dalam instansi Inspektorat sangatlah

jas dalam hal peraturan undang-undang, maka dalam hal ini sebagaimana di jelaskan dalam undang-undang itu sendiri, di perlukan langkah-langkap dalam tiap menjalankan peraturan Perundang-undangan itu sendiri, sebagaimana di jelaskan dalam Bab II pasal 2 ayat 1 dan 2 di jelaskan (1) pemerintahan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) dalam rangka pembinaan oleh pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat 1, menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan non deparatemen melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 7 sebagai berikut:

Temuan 7 : Peraturan Perundang-Undang sebagai acuan dasar terhadap suatu tindakan pengawasan.

Berdasarkan pembahasan temuan 6 (enam) dan 7 (tujuh) sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan Proposisi Minor 4 (empat) sebagai berikut:

Proposisi Minor 4 : Kepemimpinan dalam menggerakkan bawahan harus didasarkan acuan organisasi.

Faktor-Faktor Penghambat

1. Mutasi Kerja

Dalam tiap peraturan pemerintahan yang dilakukan di pemerintahan tidak jauh dari mutasi kerja, baik perubahan jabatan dan tempat kerja, apapun alasannya dalam tiap mutasi tentunya atasan punya alasan tersendiri dalam melaksanakan mutasi jabatan di pemerintahan kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh, sebagaimana kita ketahuin bersama dalam mutasi kerja ada aspek positif dan negatifnya dalam pelaksanaannya sendiri, Mutasi kerja adalah salah satu penghambat dalam Internal pengawasan di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya dimana kadang-kadang pegawai keahlian di mutasi ke provinsi dan sebaliknya pegawai yang bermasalah di tingkat provinsi maka dalam hal ini mutasi yang dilaksanakan dalam setiap mutasi yang dilakukan di perlukan bimbingan yang bagus sehingga mereka mengerti apa yang dilakukan pemerintahan dalam mutasi di pemerintahan kabupaten Aceh jaya, maka dalam landasan mutasi semua dilakukan sebagaimana peraturan dalam organisasi itu sendiri. Kata Mutasi mungkin sudah terdengar tidak aneh di telinga para karyawan atau pegawai yang bekerja di Sebuah Perusahaan/Instansi Pemerintah. Mari jabarkan terlebih dahulu apa itu mutasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mutasi” dalam bahasa administrasi berarti pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain Mutasi atau transfer menurut Wahyudi (2007:203) adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab. umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotas kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan atau pemerintahan. Transfer terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan di kabupaten Aceh Jaya provinsi Aceh. Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 8 sebagai berikut:

Temuan 8 : Mutasi sebagai penyegaran kehidupan aparaturnya dalam organisasi perlu di laksanakan di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

2. Kelangkaan Profesi

Kelangkaan Profesi tidak boleh terjadi jika ini terus terjadi akan membuat suatu pengawasan tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan pelaksanaan pemerataan

profesi di pemerintahan Aceh Jaya, di lakukan pendidikan dalam menutupi kelangkaan profesi di pemerintahan Aceh Jaya, namun kelangkaan yang banyak membuat pengawasan di pemerintahan kabupaten Aceh Jaya tidak dapat dilakukan sebagaimana yang di harapkan dalam kemampuan pemerintahan Aceh Jaya, dengan terjadinya kelangkaan profesi di pemerintahan. Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 9 sebagai berikut:

Temuan 9 : Kelangkaan profesi tergantung kebutuhan dan kepentingan organisasi.

Berdasarkan pembahasan temuan 8 (delapan) dan 9 (sembilan) sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan Proposisi Minor 5 (lima) sebagai berikut:

Proposisi Minor 5 : Kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang dalam upaya menggerakkan orang lain agar mampu mengikuti dirinya untuk kemajuan organisasi.

3. Sosialisasi

Dalam suatu Sosialisasi yang dilakukan dalam penghambat Eksternal di pemerintahan Aceh Jaya, perlu di lakukan Sosialisasi yang dilakukan secara luas kepada masyarakat dan pemerintahan sebagaimana arti peran dan tugas dari Inspektorat Aceh Jaya, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dapat dilakukan dengan baik sebagaimana arahan dalam undang-undang pemerintahan Aceh Jaya dalam melakukan, sosialisasi yang baik bagi pengawasan yang dilakukan dalam meningkatkan sosialisasi. Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 10 sebagai berikut:

Temuan 10 : Sosialisasi yang dilakukan secara luas kepada masyarakat dan pemerintahan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dapat dilakukan dengan baik.

4. Pemutakhiran Data

Dalam pemutakhirat data dilakukan di kabupaten Aceh Jaya, maka dalam ini, sebagaimana dalam setiap program yang dilakukan sangat baiknya dilakukan sebagaimana dalam pemerintahan Aceh Jaya, sehingga dalam hal ini tidak mengalami kesulitan akibat dengan adanya pemutakhiran data yang dilakukan secara sengaja atau tidak, sehingga ini menjadi faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat itu sendiri di pemerintahan kabupaten Aceh Jaya, sehingga menjadi konsep yang harus benar – benar di pelajari oleh pengawasan di kabupaten Aceh Jaya, dalam melakukan peran Inspektoral dalam pelaksanaan tugas dengan tujuan pengawasan secara baik dan positif dengan mengacu pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan baik sesuai dengan Implementasi dalam Undang-undang pemerintahan Aceh Jaya. Dalam tiap pelaksanaan dalam Implementasi di pemerintahan Aceh Jaya, dalam melakukan proses di setiap pemutakhirat data, di sini di perlukan suatu hal yang dapat dilakukan dengan baik dan sebagaimana dalam peraturan pemerintahan di kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan temuan 11 (sebelas) sebagai berikut:

Temuan 11 : Sosialisasi yang dilakukan secara luas sesuai pemutakhiran data yang dimiliki di kabupten Aceh Jaya.

Berdasarkan pembahasan temuan 8 (delapan) dan 11 (sebelas) sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan Proposisi Minor 6 (enam) sebagai berikut:

Proposisi Minor 6 : Sosialisasi yang dan pemutakhirat data dilakukan dengan memanfaatkan sumber manusia sesuai Struktur Inspektorat.

Berdasarkan pembahasan dalam Proposisi Minor 1 (satu) dan 6 (enam) sebagaimana tersebut di atas maka di dirumuskan Proposisi Mayor sebagai berikut:

Proposisi Mayor : Di dalam pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dalam Implementasi kebijakan peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahn Daerah maka peran semua pihak sangatlah penting dalam pelaksanaan Pengawasan dengan Baik di Kabupaten Aceh Jaya.

KESIMPULAN

Sebagai pelaksana pengawasan Inspektorat di Kabupaten Aceh Jaya Daerah Atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Aceh Jaya, Sebagaimana dalam Implementasi peraturan pemerintahan Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan Indikasi –Indikasi sebagai berikut Fungsi pengawasan Inspektorat Daerah, Struktur Organisasi, maupun Faktor pendukung Eksternal maupun Internal di dalam Inspektorat Aceh jaya dalam melakukan pengawasan di Pemerintahan Aceh Jaya, untuk menuju dan terwujudnya Pemerintahan Yang baik dan bersih (Good and Clean Government) maka di perlukan langkah-langkah yang Pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam melakukan pengawasan dan penempatan sumber daya manusia pada lembaga pengawasan daerah maupun Kabupaten Kota sehingga dapat memperbaiki setiap Hambatan dalam Internal maupun Eksternal.

Berdasarkan dari Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah di Uraikan sebelumnya, dapat peneliti simpulkan bahwa Pengawasan Inspektorat Daerah Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Aceh Jaya dalam Implementasi peraturan Pemerintahan Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, di daerah kabupaten Aceh Jaya, dalam pelaksanaan yang dilakukan dalam pengawasan, telah dilakukan dengan baik sebagaimana proses dalam suatu pengawasan itu sendiri, namun walaupun demikian dalam pencapaiannya belum sempurna hal ini di akibatkan oleh adanya hambatan dalam pelaksanaan fungsi inpektorat itu sendiri di kabupaten Aceh jaya, sebagai salah satu kabupaten yang ada di wilayah barat Aceh, kabupaten Aceh Jaya salah satu kabupaten yang pelaksanaan suatu proses pengawasan yang di lakukan oleh Inspektorat , dalam pengawasan pada hakekatnya merupakan Fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam tiap organisasi tanpa kecuali.

Dalam pelaksanaan pengawasan dalam Internal Inspektorat di kabupaten Aceh Jaya selain mengacu pada Peraturan pemerintahan nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, kabupaten Aceh jaya juga Memilik Landasarn Qanun, Dalam Inspektorat Yaitu Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan dalam pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh jaya tentang mengacu peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 pasal demi pasal dalam pelaksanaan di lapangan dalam setiap tujuan tugas yang dilaksanakan di pemerintahan Aceh jaya. di mana dalam pengawasan adalah suatu Tugas dan tanggung jawab yang telah di atur dalam pemerintahan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Aceh jaya, dalam suatu Organisasi khususnya di Inspektorat, Faktor kepemimpinan memenag peranan penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan Organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan Tugas yang mudah, namun kadang sebaliknya akibat karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda dengan dapat mendorong atau bawahan dapat di pengaruhi dengan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan partisipasinya kepada

tugas dan fungsinya bagi pemerintahan Kabupaten Aceh jaya dan Organisasi secara Efektif dan Efesien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul, H. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akmal. (2007). *Pemeriksaan Intern*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Amran, S. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintoro, P. (2008). *Internal Audit Charter*. Jakarta: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- Bungin, M.B. (2008). *Penelitian kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chabib, S.S. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Dunn, W.N. (2010). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hesel, N.S.T. (2007). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset.
- Koentjaraningrat. (2009). *Metode Penelitian masyarakat*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Ihyaanul, U. (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indra, B. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Konsorsarium Organisasi Profesi Audit Internal. (2004). *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: Yayasan pendidikan Internal Audit.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2007). *Auditing Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miftah, T. (2010). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miftah, T. (2010). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Kunandar. (2007). *Guru Professional Implementasi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mulyasa. (2008). *Menjadi guru Professional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Makmur. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho. (2009). *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto. (2007). *Teori Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Prasojo, E. (2007). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sanjaya, W. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Santosa. (2012). *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soetanyo. (2010). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Sarwono, W.S. (2005). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Santoso, S. (2010). *Aspek-aspek Interaksi Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.

- Parsons, W. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Wasistiono, S., et al. (2012). *Manajemen sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah (Pusat Kajian Pemerintahan STPDN)*. Bandung: FakuMedia.
- Victor, S., Edi, T. (2007) *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Pusdiklatwas–BPKP.